

Penghidupan Berkelanjutan Kepala Keluarga Penerima Redistribusi Tanah di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang

Rahayu Syafira A.N ^{1,*}, Puji Hardati²

¹ Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, 50229, Indonesia

² Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, 50229, Indonesia

^{*}) Email Korespondensi: ¹rahayusyafirana@gmail.com, ²ibupujihardati@gmail.com

Abstract

Sitasi:

Syafira, R¹, Hardati, P². (2025). *Penghidupan Berkelanjutan Kepala Keluarga Penerima Redistribusi Tanah di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang*. Jurnal Sains Geografi. Vol. 3, No. 2.

Sejarah Artikel:

Diterima: 11-10-2025

Revisi: 23-11-2025

Disetujui: 25-11-2025

Online: 28-11-2025

Publikasi: 28-11-2025

Land redistribution is implemented to address land tenure inequality that limits farmers' access to resources and economic opportunities. This study examines household distribution, land use and ownership, and the livelihood conditions of redistribution beneficiaries in Getasan Subdistrict. Using quantitative methods with spatial and descriptive analysis of five livelihood assets, the study finds that redistributed lands are concentrated in Tajuk and Kopeng. Tajuk is dominated by livestock, while Kopeng focuses on agriculture. Most beneficiaries retain ownership and manage their land independently. The program supports sustainable livelihoods, though improved access to training, capital, and local institutions remains essential.

Keyword: Land Redistribution, Land Use, Livelihood Assets, Sustainable Livelihood, Getasan District

Abstrak



Copyright: © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Ketimpangan penguasaan lahan membatasi akses petani terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Redistribusi tanah menjadi salah satu solusi, namun efektivitasnya terhadap penghidupan berkelanjutan perlu dikaji. Penelitian ini menganalisis sebaran rumah, penggunaan dan kepemilikan lahan, serta kondisi penghidupan penerima di Kecamatan Getasan dengan metode kuantitatif melalui analisis spasial dan lima modal penghidupan. Hasil menunjukkan lahan terkonsentrasi di Desa Tajuk yang didominasi peternakan dan Kopeng didominasi pertanian. Sebagian besar penerima tetap menguasai dan mengelola lahan mandiri. Modal sosial dan fisik lebih menonjol di Tajuk, sedangkan modal alam dan finansial di Kopeng. Secara umum, redistribusi tanah mendukung penghidupan berkelanjutan, meski penguatan pelatihan, permodalan, dan kelembagaan lokal masih dibutuhkan.

Kata Kunci: Aset Penghidupan, Penggunaan Lahan, Penghidupan Berkelanjutan, Redistribusi Tanah, Kecamatan Getasan

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat berdampak pada meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman dan mata pencaharian, terutama di wilayah perdesaan. Kondisi ini memperbesar tekanan terhadap struktur penguasaan dan kepemilikan tanah, terutama bagi petani kecil yang bergantung pada sektor pertanian. Ketimpangan dalam penguasaan dan kepemilikan lahan masih menjadi persoalan agraria yang signifikan di Indonesia. Banyak rumah tangga petani tidak memiliki lahan yang cukup atau bahkan sama sekali tidak memiliki akses terhadap lahan produktif, sehingga kesejahteraan mereka terganggu.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan tersebut adalah melalui program redistribusi tanah yang merupakan bagian dari reforma agraria. Program ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas lahan, meningkatkan akses terhadap sumber daya, serta mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat penerima manfaat. Namun, sejauh mana program ini mampu mendukung penghidupan berkelanjutan belum banyak dikaji, khususnya pada konteks lokal seperti di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.

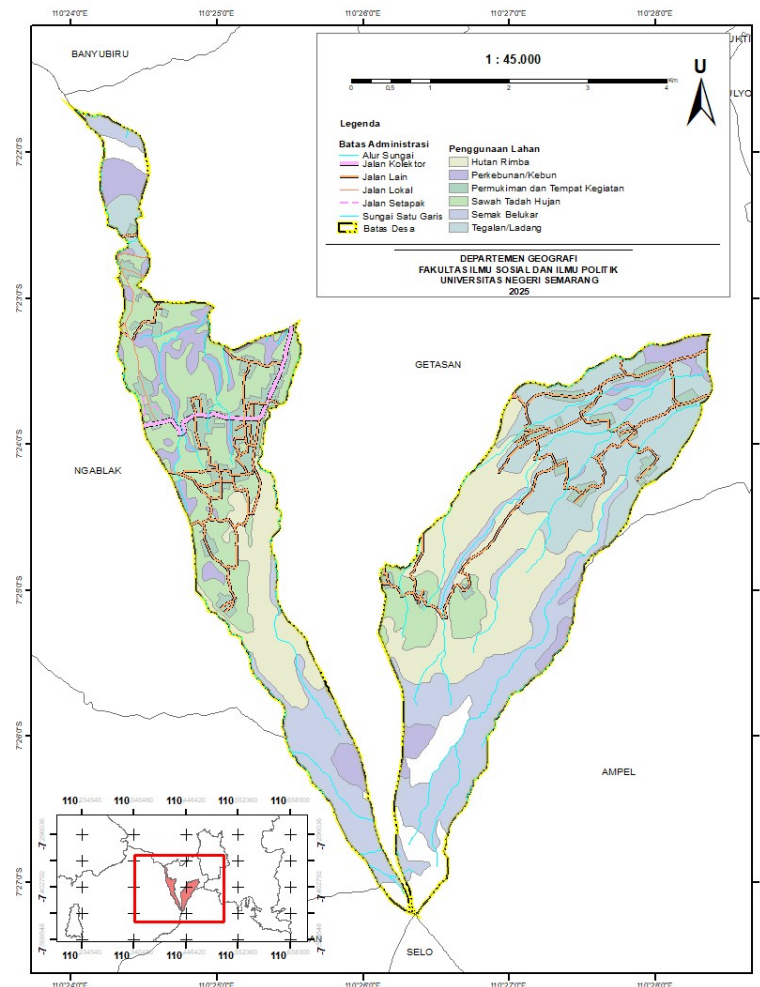
Penghidupan berkelanjutan mencakup kemampuan rumah tangga dalam memanfaatkan aset yang dimiliki, termasuk modal manusia, alam, sosial, fisik, dan finansial, untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup tanpa merusak sumber daya alam. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana lahan hasil redistribusi dimanfaatkan oleh penerima manfaat dalam kerangka keberlanjutan penghidupan.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran terkait sebaran lokasi rumah kepala keluarga, kondisi pemanfaatan lahan hasil redistribusi tanah, bentuk kepemilikan yang terjadi pasca program, serta bagaimana kepala keluarga penerima manfaat mengelola penghidupan mereka melalui aset yang tersedia guna mendukung kesejahteraan yang berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis utama. Analisis spasial dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk memetakan sebaran lokasi dan kondisi lahan. Teknik ini melibatkan tumpang susun (overlay) citra satelit sehingga dapat terlihat potensi lahan secara geografis (Nasution, 2020). Nasution (2020) memetakan potensi lahan reforma agraria di kawasan hutan seluas 1.416 ha dengan metode GIS tersebut (Nasution, 2020). Analisis deskriptif diterapkan untuk menggambarkan pola penggunaan lahan dan kepemilikan lahan redistribusi.

Pendekatan ini bersifat kualitatif-deskriptif, dengan merinci data demografi dan lahan seperti yang dilakukan oleh Riyadi et al. (2020) dalam studi pemberdayaan masyarakat pasca-redistribusi di Desa Sumogawe (Riyadi, et.al, 2020). Selanjutnya, analisis kuantitatif dipakai untuk mengukur tingkat penghidupan berkelanjutan keluarga penerima redistribusi. Metode statistik seperti regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh berbagai faktor (misalnya jarak ke fasilitas atau daya beli) terhadap kesejahteraan penduduk. Sebagai contoh, Putri et al. (2024) menggunakan regresi multilinier untuk menilai pengaruh jarak ke obyek wisata dan aksesibilitas jalan terhadap perubahan nilai lahan di Kecamatan Getasan (Putri, et.al, 2024).



Gambar 2. Peta Penggunaan Lahan Redistribusi Tanah Desa Tajuk dan Desa Kopeng
Sumber: Data Primer, 2025

3) Kepemilikan Pasca Redistribusi Tanah

Status kepemilikan lahan oleh kepala keluarga saat program redistribusi tanah telah terlaksana dan saat ini ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Status Kepemilikan Saat Redistribusi Tanah

Status kepemilikan	Saat Redistribusi Tanah (2019)				
	Desa Tajuk			Desa Kopeng	
	Banaran	Sukowolu	Sidomukti	Blancir	Seleker
	Persentase			Persentase	
	($\%$)			($\%$)	
Pemilik	44,44	55,56	33,33	16,67	50
Penggarap	0	0	0	0	0
Penyewa	0	0	0	0	0

Lainnya (Warisan hubah belum bersertifikat, tidak memiliki hak apapun)	0	0	0	0	0
Jumlah	44,44	55,56	33,33	16,67	50

Sumber: Penulis

Tabel 2. Status Kepemilikan Saat Ini

Status kepemilikan	Saat Redistribusi Tanah (2019)				
	Desa Tajuk			Desa Kopeng	
	Banaran	Sukowolu	Sidomukti	Blancir	Seleker
	Persentase			Persentase	
	(%)			(%)	
Pemilik	44,44	51,85	33,33	16,67	50
Penggarap	0	3,7	0	0	0
Penyewa	0	0	0	0	0
Lainnya (Warisan hubah belum bersertifikat, tidak memiliki hak apapun)	0	0	0	0	0
Jumlah	44,44	55,55	33,33	16,67	50

Sumber: Penulis

4) Penghidupan Berkelanjutan Kepala Keluarga Penerima Redistribusi Tanah

Analisis dilakukan dengan skoring sehingga dapat menggambarkan kondisi aset penghidupan di Desa Tajuk dan Desa Kopeng dalam bentuk kuantitatif. Skor masing-masing variabel didapatkan dari rata-rata skor yang diberikan pada masing-masing responden sesuai dengan hasil kuesioner. Selain pemberian nilai, akan dijelaskan juga kondisi akses ke aset penghidupan, aset penghidupan, dan aktivitas yang dilakukan oleh kepala keluarga secara deskriptif sebagai gambaran awal untuk mengetahui tingkat keberlanjutannya.

Tabel 3. Skoring Kondisi Akses Penghidupan di Desa Tajuk dan Desa Kopeng

Desa Tajuk	Desa Kopeng
-------------------	--------------------

Akses Ke Modal	Banaran	Sukowolu	Sidomukti	Blancir	Seleker
	(%)			(%)	
Manusia	82,19	82	81,31	79,28	80,19
Alam	78,24	77,78	80,28	83,03	85
Sosial	81,71	77,08	77,92	75,3	74,31
Fisik	82,29	79,17	85,42	84,54	86,04
Finansial	61,46	62,5	61,25	61,12	62,19
Jumlah	77,178	75,706	77,236	76,654	77,546
Penghidupan Berkelanjutan	Berkelanjutan	Berkelanjutan	Berkelanjutan	Berkelanjutan	Berkelanjutan
n	n	n	n	n	n

Sumber: Penulis

Tabel 4. Skoring Kondisi Aset Penghidupan di Desa Tajuk dan Desa Kopeng

Akses Ke Modal	Desa Tajuk			Desa Kopeng	
	Banaran	Sukowolu	Sidomukti	Blancir	Seleker
	(%)			(%)	
Manusia	74,54	75,69	66,11	63,27	65,56
Alam	72,14	67,45	64,69	61,79	58,13
Sosial	53,65	52,08	60,47	60,09	59,63
Fisik	92,29	92,29	85,63	84,51	84,5
Finansial	69,94	66,96	65,54	65,48	59,29
Jumlah	72,51	70,89	68,49	67,03	65,42
Penghidupan Berkelanjutan	Cukup berkelanjutan	Cukup berkelanjutan	Cukup berkelanjutan	Cukup berkelanjutan	Cukup berkelanjutan
n	n	n	n	n	n

Sumber: Penulis

Tabel 5. Aktivitas Desa Tajuk dan Desa Kopeng

Aktivitas	Indikator	Desa Tajuk		Desa Kopeng		
		Banaran	Sukowolu	Sidomukti	Blancir	Seleker
		(%)			(%)	
Pekerjaan Utama	Petani atau peternak	97	100	96,25	96,51	99,37
	Pengusaha kecil					

Sumber Pendataan Lain	Pekerja Formal					
	Jasa (berdagang, kerajinan, buruh lepas)					
	UMKM				65,62	
	Promosi Media Sosial	60,42	58,93	68,21		62,5
Total		78,71	79,465	82,23	81,065	80,935
Penghidupan Berkelanjutan		Berkelanjutan n	Berkelanjutan n	Berkelanjutan n	Berkelanjutan n	Berkelanjutan n

Sumber: Penulis

3.2. PEMBAHASAN

1) Sebaran Lokasi Rumah Tangga Kepala Keluarga Penerima Redistribusi Tanah

Peta sebaran rumah tinggal kepala keluarga penerima redistribusi tanah di Desa Tajuk dan Desa Kopeng menunjukkan pola mengelompok mengikuti jaringan jalan dan kedekatan dengan lahan garapan. Kondisi ini sejalan dengan Teori Sebaran Spasial (Hardati, 2019) yang menekankan bahwa distribusi permukiman dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas dan fungsi lahan di sekitarnya.

Aksesibilitas antara rumah tinggal dengan lahan hasil redistribusi menjadi penentu utama dalam pemanfaatan tanah. Hal ini sesuai dengan teori akses penghidupan berkelanjutan (Saragih et al., 2007; Scoones, 1998), bahwa akses tidak hanya berarti kepemilikan lahan, tetapi juga kemampuan menjangkau dan mengelola sumber daya. Desa Tajuk memiliki rumah tinggal yang relatif lebih dekat dengan lahan, sehingga pemanfaatannya lebih optimal dibandingkan dengan Desa Kopeng yang menghadapi kendala jarak dan topografi.

Temuan ini mendukung teori penghidupan berkelanjutan (Chambers & Conway, 1992) yang menekankan pentingnya keterhubungan antar modal penghidupan, khususnya modal fisik berupa sarana transportasi dan kedekatan lokasi. Dalam konteks redistribusi tanah, kepastian hak milik sebagaimana diatur dalam Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang Reforma Agraria memang memberikan dasar legalitas, tetapi optimalisasi penghidupan masyarakat penerima sangat ditentukan oleh kualitas aksesibilitas menuju lahan.

2) Penggunaan Lahan Redistribusi Tanah

Penggunaan lahan oleh kepala keluarga penerima redistribusi tanah di Kecamatan Getasan menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh kondisi geografis. Di Desa Tajuk, penggunaan lahan didominasi oleh peternakan baik pada awal pelaksanaan redistribusi maupun saat ini, disebabkan keterbatasan akses dan kondisi fisik lahan, seperti medan curam dan sulit dijangkau. Sebaliknya, Desa Kopeng yang memiliki akses lebih baik dan kondisi lahan relatif datar, mayoritas lahan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian yang produktif. Saat redistribusi berlangsung, 81,48% lahan di Desa Tajuk digunakan untuk peternakan, sedangkan Desa Kopeng 96,67% untuk pertanian. Kondisi saat ini masih menunjukkan dominasi peternakan di Tajuk (74,07%) dan pertanian di Kopeng, meskipun terdapat sedikit alih fungsi lahan di Kopeng menjadi bangunan atau dibiarkan kosong. Perbedaan luas dan aksesibilitas lahan di kedua desa turut memengaruhi pola penggunaan. Pemanfaatan produktif di Desa Kopeng berkontribusi pada peningkatan pendapatan penerima manfaat, mencerminkan keberhasilan program redistribusi tanah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, sesuai tujuan Reforma Agraria (Perpres No. 62 Tahun 2023). Sebaliknya, keterbatasan fisik dan akses di Desa Tajuk menyebabkan optimalisasi lahan belum sepenuhnya tercapai.

3) Kepemilikan Pasca Redistribusi Tanah

Pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Tajuk dan Desa Kopeng, menunjukkan keberhasilan dalam memberikan kepemilikan legal kepada seluruh kepala keluarga penerima manfaat pada saat program dilaksanakan tahun 2019. Data menunjukkan bahwa seluruh lahan telah dimiliki secara sah oleh para penerima manfaat di lima dusun yang menjadi lokasi penelitian, yaitu Banaran, Sukowolu, dan Sidomukti di Desa Tajuk, serta Blancir dan Seleker di Desa Kopeng, dengan total persentase kepemilikan 100% di seluruh wilayah pada awal pelaksanaan redistribusi.

Kondisi terkini (2025) menunjukkan adanya perubahan status kepemilikan di Desa Tajuk. Dusun Sukowolu tercatat mengalami pergeseran status kepemilikan, sebanyak 3,70% kepala keluarga tercatat sebagai penggarap. Perubahan ini mengindikasikan adanya alih kepemilikan yang kemungkinan terjadi karena proses pewarisan atau hibah yang belum disertai pembaruan sertifikat resmi atas nama penerima baru. Di luar perubahan tersebut, seluruh kepala keluarga di dusun-dusun lainnya tetap mempertahankan status sebagai pemilik atas lahan hasil redistribusi.

Desa Kopeng, status kepemilikan menunjukkan konsistensi sejak tahun 2019 hingga 2025, seluruh kepala keluarga masih tercatat sebagai pemilik. Tidak terdapat perubahan menjadi penggarap, penyewa, maupun kategori lainnya seperti warisan atau hibah yang belum bersertifikat. Kondisi ini menunjukkan bahwa Desa Kopeng cenderung lebih stabil dalam mempertahankan hak kepemilikan formal atas lahan yang telah diberikan melalui program redistribusi tanah.

Berdasarkan sebaran per dusun, proporsi terbesar pemilik lahan pada saat redistribusi terdapat di Dusun Sukowolu (55,56%) dan Seleker (50,00%), sementara yang paling

rendah terdapat di Dusun Blancir (16,67%). Kondisi ini tetap konsisten hingga tahun 2025, kecuali di Dusun Sukowolu yang mengalami sedikit penurunan karena munculnya status penggarap. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, program redistribusi tanah berhasil menjaga stabilitas kepemilikan lahan secara legal, meskipun terdapat dinamika di tingkat rumah tangga penerima manfaat.

Secara keseluruhan, redistribusi tanah telah memberikan dampak positif terhadap legalitas kepemilikan lahan oleh petani kecil di Kecamatan Getasan. Namun, munculnya status penggarap meskipun dalam skala kecil mencerminkan potensi terjadinya fragmentasi kepemilikan atau alih fungsi penguasaan yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lanjutan dalam bentuk pendampingan administratif, penyuluhan hukum agraria, serta monitoring keberlanjutan kepemilikan agar dampak redistribusi tanah tetap terjaga dalam jangka panjang.

4) Kepala Keluarga Penerima Redistribusi Tanah

a. Akses

Hasil penelitian menunjukkan data rata-rata skor dan persentase akses terhadap lima modal penghidupan, dapat disimpulkan bahwa kondisi akses modal di kedua desa secara umum berada pada kategori **baik**, kecuali pada modal finansial yang masih tergolong **sedang**.

- **Modal Manusia**

Modal manusia di seluruh dusun menunjukkan capaian di atas 79%, dengan nilai tertinggi berada di Dusun Banaran (82,19%) dan terendah di Dusun Blancir (79,28%). Capaian tinggi ini mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki kemampuan dasar yang baik dalam aspek pendidikan, keterampilan, dan kesehatan sebagai modal utama dalam menunjang aktivitas penghidupan mereka. Hal ini memperkuat temuan bahwa sebagian besar penerima manfaat merupakan tenaga kerja aktif yang masih produktif secara usia dan mampu mengelola lahan secara mandiri.

- **Modal Alam**

Desa Kopeng (terutama Dusun Seleker dan Blancir) menunjukkan keunggulan dengan capaian 85,00% dan 83,03%, lebih tinggi dibanding dusun-dusun di Desa Tajuk. Hal ini mencerminkan kondisi alam yang lebih mendukung produktivitas lahan, termasuk kesuburan tanah dan ketersediaan air, yang turut berkontribusi terhadap dominasi aktivitas pertanian di wilayah ini. Temuan ini sejalan dengan observasi bahwa pertanian lahan kering lebih berkembang di Desa Kopeng, dibandingkan dengan Tajuk yang lebih banyak mengembangkan peternakan.

- **Modal Sosial**

Akses terhadap modal sosial memiliki capaian tertinggi di Dusun Banaran (81,71%), mengindikasikan kuatnya jaringan sosial, partisipasi masyarakat dalam kelompok, serta akses terhadap informasi. Sebaliknya, nilai terendah ditemukan di Dusun Seleker (74,31%), menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi dalam kelompok usaha tani. Hal ini penting untuk mendukung keberlanjutan penghidupan melalui kolaborasi dan pertukaran informasi antar petani.

- **Modal Finansial**

Modal finansial menjadi yang paling rendah secara konsisten di seluruh wilayah, berkisar antara 61,12% hingga 62,50%. Hal ini menandakan masih rendahnya akses

terhadap sumber permodalan, baik formal maupun informal, serta rendahnya tabungan atau pendapatan yang stabil. Keterbatasan ini menjadi tantangan utama dalam mengembangkan usaha tani skala kecil secara berkelanjutan, yang memerlukan dukungan intervensi dari pemerintah daerah maupun lembaga keuangan mikro.

- **Modal Fisik**

Modal fisik, seluruh dusun menunjukkan capaian cukup tinggi, khususnya Dusun Seleker (86,04%) dan Sidomukti (85,42%). Akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan bangunan pertanian tampak menjadi faktor pendukung utama dalam menunjang produktivitas. Modal fisik yang baik menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan efisiensi produksi dan distribusi hasil pertanian maupun peternakan.

b. Aset

- **Aset Manusia**

Modal manusia, yang mencakup pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan, memiliki nilai tertinggi di Dusun Sukowolu (75,69%) dan terendah di Dusun Blancir (63,27%). Nilai ini relatif sedang, menunjukkan bahwa sebagian besar penerima manfaat telah memiliki kemampuan dasar dalam mengelola sumber daya yang ada, namun masih diperlukan peningkatan kapasitas, terutama dalam hal keterampilan teknis dan akses pelatihan pasca-redistribusi.

- **Aset Alam**

Modal alam menunjukkan tren penurunan dari barat (Dusun Banaran) ke timur (Dusun Seleker). Dusun Banaran memiliki nilai tertinggi sebesar 72,14%, sedangkan Dusun Seleker hanya mencapai 58,13%. Rendahnya modal alam di Dusun Seleker dapat dikaitkan dengan keterbatasan kualitas lahan, akses air, atau faktor ekologi lainnya yang membatasi potensi lahan untuk dimanfaatkan secara optimal. Temuan ini sejalan dengan dominasi kegiatan pertanian lahan kering di Kopeng yang memerlukan upaya adaptasi terhadap kondisi fisik lahan.

- **Aset Sosial**

Modal sosial menunjukkan nilai relatif rendah di seluruh wilayah, berkisar antara 52,08% hingga 60,47%. Dusun Sidomukti mencatat nilai tertinggi, mengindikasikan adanya kohesi sosial dan jaringan kelembagaan yang lebih baik. Nilai yang rendah di dusun lain mencerminkan masih lemahnya partisipasi dalam kelompok tani, koperasi, atau forum desa yang bisa memperkuat posisi tawar petani kecil.

- **Aset Finansial**

Modal finansial menunjukkan capaian menengah, dengan nilai tertinggi di Dusun Banaran (69,94%) dan terendah di Dusun Seleker (59,29%). Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap tabungan, kredit, dan sumber pendapatan belum sepenuhnya merata. Beberapa penerima manfaat masih mengandalkan pendapatan harian atau musiman, yang berdampak pada kestabilan ekonomi rumah tangga mereka.

- **Aset Fisik**

Aset fisik Modal fisik menjadi satu-satunya aset dengan capaian sangat tinggi di semua wilayah, terutama di Dusun Banaran dan Sukowolu yang masing-masing mencapai 92,29%. Hal ini menandakan infrastruktur dasar seperti akses jalan, fasilitas produksi, dan perumahan berada dalam kondisi baik. Akses terhadap

modal fisik menjadi pondasi penting dalam mendukung aktivitas produktif dan mobilitas sumber daya.

c. Aktivitas

Aktivitas penghidupan menggambarkan bagaimana masyarakat penerima redistribusi tanah memanfaatkan aset dan akses yang dimiliki dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. aktivitas penghidupan menunjukkan bahwa sebagian besar kepala keluarga penerima redistribusi tanah di kedua desa masih bergantung pada pekerjaan utama sebagai petani atau peternak. Persentase tertinggi terdapat di Dusun Sukowolu (100%) dan Seleker (99,37%), sedangkan nilai terendah pun tetap tinggi di Dusun Sidomukti (96,25%). Hal ini mencerminkan bahwa sektor pertanian dan peternakan tetap menjadi tumpuan utama mata pencaharian masyarakat penerima manfaat, serta menunjukkan adanya konsistensi dan ketergantungan terhadap pemanfaatan lahan sebagai sumber penghidupan.

Aktivitas ekonomi lainnya, seperti pengelolaan UMKM atau usaha kecil sebagai sumber pendapatan tambahan, menunjukkan variasi yang lebih signifikan. Dusun Sidomukti memiliki capaian tertinggi (68,21%), diikuti oleh Dusun Blancir (65,62%), sedangkan Dusun Sukowolu mencatat angka terendah (58,93%). Hal ini menunjukkan bahwa di beberapa wilayah, diversifikasi ekonomi telah mulai berkembang meskipun masih terbatas. Aktivitas pendukung seperti perdagangan hasil pertanian, produksi olahan makanan, atau jasa lokal menjadi alternatif pendapatan yang penting dalam mengurangi risiko ekonomi rumah tangga, terutama saat hasil utama pertanian atau peternakan menurun.

Namun demikian, indikator lain seperti pekerja formal, jasa (pedagang, kerajinan, buruh lepas), serta pemanfaatan media sosial sebagai promosi usaha belum muncul secara signifikan dalam data ini. Hal ini mengindikasikan bahwa transformasi ekonomi rumah tangga belum sepenuhnya mengarah pada integrasi dengan sektor formal maupun digital, dan masih sangat berbasis pada ekonomi tradisional dan lokal.

Total capaian aktivitas tertinggi tercatat di Dusun Sidomukti (82,23%), yang menunjukkan kombinasi kuat antara pekerjaan utama dan pendapatan tambahan, diikuti oleh Dusun Seleker dan Blancir. Sebaliknya, Desa Tajuk menunjukkan nilai aktivitas yang sedikit lebih rendah dibandingkan Desa Kopeng, meskipun secara umum seluruh dusun telah memiliki tingkat keterlibatan ekonomi yang tinggi.

Temuan ini mengindikasikan bahwa redistribusi tanah telah mampu mendorong penerima manfaat untuk tetap aktif dalam kegiatan ekonomi berbasis lahan. Namun, untuk mendorong keberlanjutan penghidupan, perlu adanya strategi penguatan ekonomi rumah tangga melalui diversifikasi pendapatan, pengembangan usaha kecil, serta pelatihan pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi dan pemasaran hasil usaha. Pendekatan ini penting guna menciptakan sistem penghidupan yang lebih adaptif, mandiri, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

4. KESIMPULAN

Program redistribusi tanah di Kecamatan Getasan telah memberikan dampak positif terhadap penghidupan berkelanjutan kepala keluarga penerima manfaat. Lahan redistribusi tersebar di dua desa utama, yaitu Desa Tajuk dan Desa Kopeng, dengan konsentrasi kepemilikan yang

relatif merata. Aksesibilitas lahan di Desa Kopeng lebih mendukung pemanfaatan produktif karena kondisi fisik lahan yang lebih baik dan kemudahan akses transportasi, sementara di Desa Tajuk pemanfaatan lebih terfokus pada peternakan akibat keterbatasan tersebut.

Kepemilikan, sebagian besar penerima manfaat masih mempertahankan hak atas tanah dan mengelolanya secara mandiri, meskipun terdapat variasi dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam aspek penataan aset, namun masih diperlukan penguatan dalam penataan akses, khususnya dalam hal pelatihan, permodalan, dan dukungan kelembagaan.

Akses terhadap lima modal penghidupan, baik Desa Tajuk maupun Desa Kopeng menunjukkan capaian yang cukup baik pada modal manusia dan fisik, namun masih terdapat kelemahan pada modal finansial dan sosial, yang memengaruhi kapasitas masyarakat untuk mengembangkan usaha secara lebih mandiri dan berkelanjutan. Aset penghidupan masyarakat juga menunjukkan pola yang serupa, dengan modal fisik sebagai kekuatan utama, sementara modal alam dan sosial bervariasi antar dusun, mencerminkan ketimpangan kondisi lingkungan dan hubungan sosial yang dimiliki oleh masing-masing kelompok masyarakat.

Aktivitas penghidupan utama mayoritas kepala keluarga masih bergantung pada pertanian dan peternakan. Namun, keberadaan sumber pendapatan tambahan seperti UMKM mulai berkembang di beberapa dusun, khususnya di Desa Kopeng, yang menunjukkan adanya upaya diversifikasi ekonomi rumah tangga. Kendati demikian, keterlibatan dalam sektor formal dan pemanfaatan teknologi digital masih sangat terbatas.

Redistribusi tanah di Kecamatan Getasan telah mendukung terciptanya penghidupan yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi penerima manfaat. Meskipun demikian, upaya lanjutan masih dibutuhkan untuk memperkuat modal yang belum optimal, terutama dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperluas akses permodalan, serta membangun kelembagaan lokal yang mampu mendampingi masyarakat dalam jangka panjang. Pemerintah daerah diharapkan turut berperan aktif dalam memfasilitasi proses ini agar pemanfaatan lahan benar-benar optimal dan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaluddin, Z. (2022). *Pendekatan sustainable livelihood framework*. Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik & Pemerintahan, 11(2), 34–43.
- Badan Pusat Statistik. (2024a). *Jumlah penduduk menurut provinsi di Indonesia*. <https://sulut.bps.go.id/indicator/12/958/1/jumlah-penduduk-menurut-provinsi-di-indonesia.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024b). *Persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (persen)*.
- Chambers, R., & Conway, G. R. (1992). *Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century* (IDS Discussion Paper No. 296).
- Department for International Development. (1999). *DFID's sustainable livelihoods approach and its framework*.
- Ellis, F. (2000). The determinants of rural livelihood diversification in developing countries. *Journal of Agricultural Economics*. <https://doi.org/10.1111/j.1477-9552.2000.tb01229.x>
- Hardati, P. (2018). *Mobilitas penduduk: Strategi penghidupan berkelanjutan, pendekatan keruangan*.

- Hardati, P. (2019). Spatial distribution of livelihood assets of tourism village in West Ungaran Subdistrict Semarang Regency Central Java Province Indonesia. *ICoRSIA 2018*, 313, 279–284. <https://doi.org/10.2991/icorsia-18.2019.68>
- Jaya, M. R., Gandri, L., Sudia, L. B., Qadri, M. S., Junartin, T., Ode, W., Fahidu, H., Setiawan, A., & Hidayat, H. (2024). Penggunaan lahan di Kecamatan Baruga Kota Kendari. *[Nama Jurnal]*, 5(1), 146–153.
- Juhadi. (2007). Pola-pola pemanfaatan lahan dan degradasi lingkungan pada kawasan perbukitan. *Jurnal Geografi*, 4(1), 11–24.
- Kusuma, F. (2021). Akses reform sebagai pemberdayaan masyarakat. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Martini, S., Ash-Shafikh, M. H., & Afif, N. C. (2019). Implementasi reforma agraria terhadap pemenuhan harapan masyarakat yang bersengketa lahan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(2), 150–162. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.367>
- Nasution, S. A. (2020). Identifikasi secara spasial potensi tanah objek reforma agraria dalam kawasan hutan di Kota Langsa Provinsi Aceh. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Yogyakarta. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Pradnyaswari, I., Wijayanti, W. P., & Subagiyo, A. (2021). Tingkat penghidupan berkelanjutan masyarakat Desa Purwakerti Kabupaten Karangasem. *Pure Journal*, 11, 135–146.
- Putri, A. S. ., Amarrohman, F. J., & Yusuf, M. A. (2024). Analysis of Land Value Changes and Its Correlation with the Existence of Tourism and Accessibility in 2017-2024 . *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 10(2), 216–241. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v10i2.794>
- Ragil, C., & Eris, V. A. (2018). Strategi penghidupan berkelanjutan petani lahan pasir berbasis aset natural dan aset fisik di pesisir Desa Bugel Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo. *[Nama Jurnal]*, 1(1), 7–16.
- Rasyid, S. A., Lapasere, R. S., & Nutfa, M. (2022). Ketimpangan penguasaan tanah, kemiskinan, dan strategi bertahan hidup masyarakat petani di Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8), 10320–10336.
- Riyadi, A. D., Salim, N., & Mujiati, M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. *Tunas Agraria*, 3(2), 20–39. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.105>
- Rochaida, E. (2016). Dampak pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan. *Forum Ekonomi*, 18(1), 14–24.
- Rohmah, B. A. (2019). Strategi penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood) masyarakat di kawasan lahan kering Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. *Swara Bhumi*, 1(2), 1–10. <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1046700>
- Sakallessy, G., & Lasaiba, M. A. (2025). Analisis pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap perkembangan permukiman pada Desa Itawaka Kecamatan Saparua Timur. *[Nama Jurnal]*, 4, 11–19.
- Saleh, S. E. (2014). Strategi penghidupan penduduk sekitar Danau Limboto Provinsi Gorontalo. *[Nama Jurnal]*, 1(22).
- Saragih, S., Lassa, J., & Ramli, A. (2007). *Kerangka penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood framework)*. Hivos–Circle Indonesia. [https://www.academia.edu/download/47712304/Kerangka Penghidupan Berkelanjutan.pdf](https://www.academia.edu/download/47712304/Kerangka_Penghidupan_Berkelanjutan.pdf)
- Scoones, I. (1998). *Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis* (IDS Working Paper No. 72). http://forum.ctv.gu.se/learnloop/resources/files/3902/scoones_1998_wp721.pdf